LAPORAN KEGIATAN

SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN II
Universitas Brawijaya Malang, 25 November 2017

Penyusun:
Dr. M. Rizal Taufikurohman

UNIVERSITAS TRILOGI
JAKARTA
2017

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama dan NIK : M. Rizal Taufikurohman

Jabatan dan Unit Kerja : Dosen dan Program Studi Agribisnis

Melaporkan kegiatan sebagai berikut:

1. **Nama Kegiatan** : Seminar Nasional Pembangunan Pertanian II Universitas Brawijaya Malang dan PERHEPI Komda Malang
2. **Penyelenggara** : Universitas Brawijaya Malang dan PERHEPI Komda Malang
3. **Tempat Pelaksanaan** : Fakultas Pertanian
4. **Waktu Pelaksanaan** : 21 November 2017
5. **Rangkaian Kegiatan** :

Waktu	Kegiatan	Keterangan
07.00-08.00	Registrasi	Panitia
08.00-08.15	Pembukaan	Panitia
08.15-08.30	Sambutan	Rektor UB
08.30-08.45	Coffeebreak	Panitia
08.45-09.30	Keynote Speaker 1	Prof. Hermanto Siregar, Ph.D
09.30-10.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator: Dr. Sujarwo, M.Sc
10.00-10.45	Keynote Speaker 2	Dr. Ir. Mat Syukur, MS
10.45-11.15	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator: Dr. Sujarwo, M.Sc
11.15-11.30	Penyerahan Cinderamata	Panitia
11.30-12.00	Penutupan Acara	Dekan UB
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-16.00	Paralel Session	

6. **Deskripsi Kegiatan :**

- Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa Sektor pertanian merupakan kunci utama tahap awal keberhasilan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan sebagaimana hierarki Maslow bahwa tingkat kebutuhan pertama sumberdaya manusia Physical needs yang termasuk diantaranya adalah kebutuhan akan makanan, air, dan lainnya untuk hidup sehat dan produktif. Pemenuhan kebutuhan ini ada di sektor pertanian yang memiliki dimensi produksi yang diharapkan mampu melakukan perbaikan efisiensi secara berkelanjutan (precision and sustainable agriculture).

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Dimensi produksi berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya penyediaan pangan (food availability) yang cukup baik kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Perwujudan dari produksi berkelanjutan adalah konsep good agricultural practices/precision in using inputs dalam implementasi teknologinya dan green agriculture dalam implementasi manajerial sumberdaya pertanian. Teknologi dan kemampuan manajerial dalam mengelola sumberdaya pertanian yang terbatas (limited resources) perlu ditingkatkan secara terus menerus (continuous improvement) karena setiap masa ada perubahan faktor-faktor lingkungan sektor pertanian yang perlu direspon secara optimum/bijaksana. Output dari respon optimum adalah efisiensi dalam menjalankan sustainable agriculture, sedangkan outcomenya adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pareto optimum atau setidaknya pareto improvement. Selanjutnya, respon yang optimum sebagai jawaban atas perubahan-perubahan tersebut menjadi amanah utamanya bagi pemerintah dan perguruan tinggi.
- Wujud dari responsibilitas perguruan tinggi bagi pembangunan, maka dalam rangka dies natalis ke-57, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya (FPUB) melaksanakan Seminar "Tantangan dan arah Pembangunan Pertanian Indonesia Dalam Era SDGs". Harapan besar dari masyarakat untuk peran perguruan tinggi yang lebih signifikan akan diwujudkan dengan moving forward a little step ahead melalui seminar ini.
- Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dan sambutan-sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Panitia
- Pemaparan materi dan diskusi terkait dengan topik yang dipaparkan masing-masing pembicara. Moderator memberikan penjelasan, menguide dan memberikan fasilitasi kesimpulan dalam kegiatan ini.
- Diskusi antara peserta seminar dengan pembicara dibagi ke dalam 3 sesi. Setiap sesi diberikan kesempatan kepada 3 penanya.
- Selanjutnya setelah selesai diskusi, acara langsung ditutup dan foto bersama.

. Dokumentasi kegiatan:

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

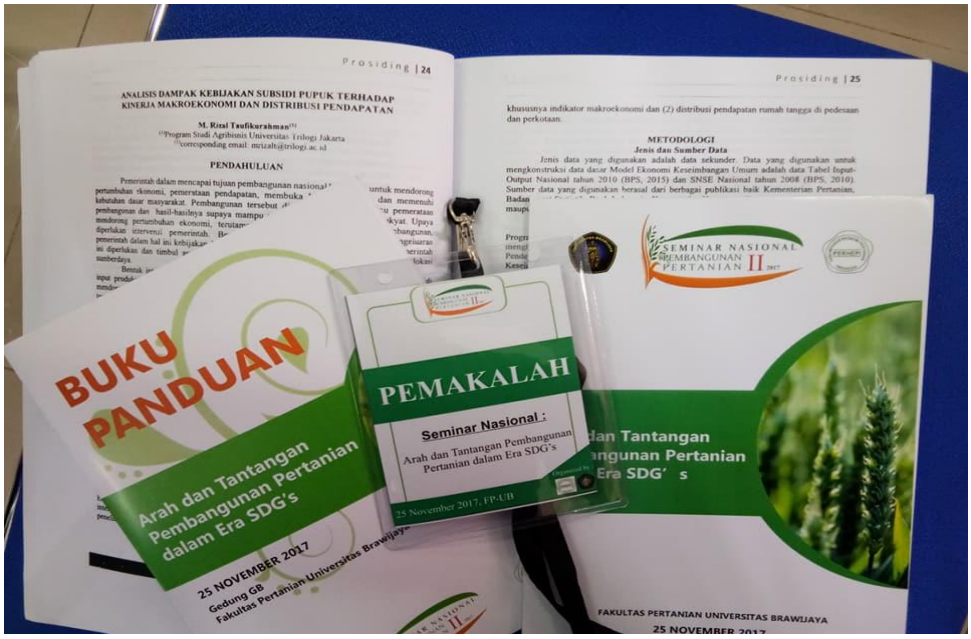

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 1. Sertifikat

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sertifikat

Nomor : 9380/UN10.F04.14/PP/2017

Diberikan Kepada :

M. Rizal Taufikurohman

Sebagai :

Pemakalah

Pada acara Seminar Nasional Pembangunan Pertanian:

"Arah dan Tantangan Pembangunan Pertanian dalam Era SDG's"

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Malang, 25 November 2017

Dekan
Fakultas Pertanian,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS
NIP. 19581128 198303 1 005

Ketua Pelaksana,

Wisynu Ari Gutama, SP., MMA.
NIP. 19760914 200501 1 002

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 2. Prosiding

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii - viii

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah pada Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Kediri 1
Umbu Maramba

Volatilitas Harga Jagung Dalam Era Pembangunan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan 2
Vi'in Ayu Pertiwi, Nur Baladina, Fitrotul Laili

Analisis Kesediaan Membayar (*Willingness To Pay*) Produk Telur Organik Srikandi di Kabupaten Jember 9
Oktarany Eka, Rudi Wibowo, Mustapit

Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Kinerja Makroekonomi dan Distribusi Pendapatan 16
M. Rizal Taufikurahman

Dampak Kebijakan Tarif Terhadap Penawaran Jagung Nasional 24
Nuhfil Hanani, Wiwit Widyawati

Dampak Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Terhadap Harga Gula Petani 30
Yati Nuryati, Bagus Wicaksena

Tingkat Kelayakan Ekonomi Penggunaan Saluran Irigasi Bagi Petani Dalam Menunjang Kegiatan Swasembada Pangan di Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo 34
Tatang Suryadi, Ratna Dewi Mulyaningtiyas, Rahmat J.Hayasi

Analisis Pengaruh Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Produksi Padi di Indonesia 41
Wiwit Widyawati

Pengaruh Pedagang Sayuran Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Tawangargo 46
Sugeng Riyanto

Pola Konsumsi Ubi Kayu di Indonesia 51
Ratya Anindita, Fitrotul Laili, Nur Baladina

55

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

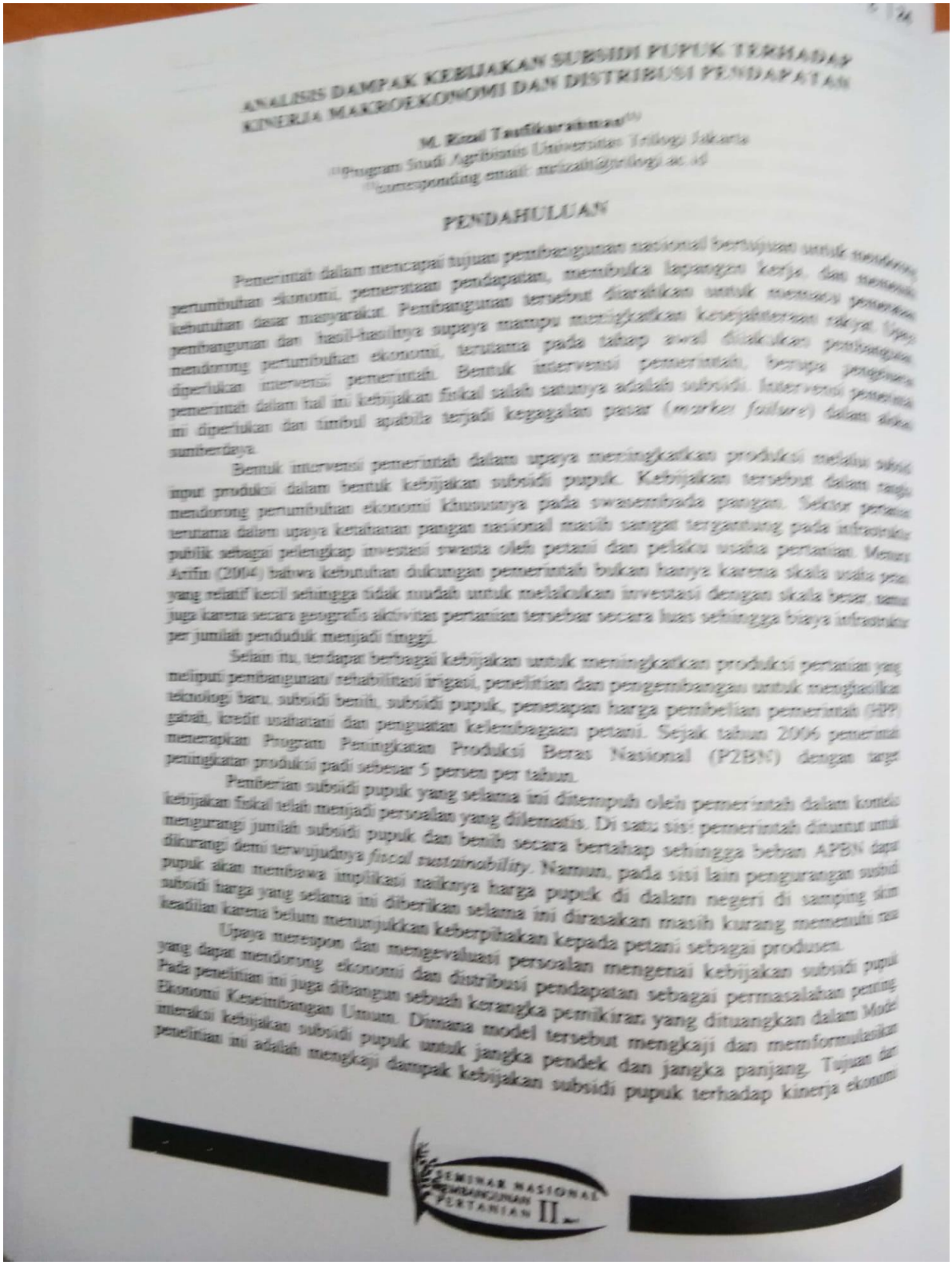

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

M. Rizal Taufikurahman[1)]

[1)]Program Studi Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta
[1)]corresponding email: mrizalt@trilogi.ac.id

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan tersebut diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya supaya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahap awal dilakukan pembangunan diperlukan intervensi pemerintah. Bentuk intervensi pemerintah, berupa pengaturan pemerintah dalam hal ini kebijakan fiskal salah satunya adalah subsidi. Intervensi pemerintah ini diperlukan dan timbul apabila terjadi kegagalan pasar (*market failure*) dalam alokasi sumberdaya.

Bentuk intervensi pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi melalui subsidi input produksi dalam bentuk kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan tersebut dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada swasembada pangan. Sektor pertanian terutama dalam upaya ketahanan pangan nasional masih sangat tergantung pada infrastruktur publik sebagai pelengkap investasi swasta oleh petani dan pelaku usaha pertanian. Menurut Arifin (2004) bahwa kebutuhan dukungan pemerintah bukan hanya karena skala usaha petani yang relatif kecil sehingga tidak mudah untuk melakukan investasi dengan skala besar, tetapi juga karena secara geografis aktivitas pertanian tersebar secara luas sehingga biaya infrastruktur per jumlah penduduk menjadi tinggi.

Selain itu, terdapat berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian yang meliputi pembangunan/rehabilitasi irigasi, penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi baru, subsidi benih, subsidi pupuk, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, kredit usahatani dan penguatan kelembagaan petani. Sejak tahun 2006 pemerintah menerapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan target peningkatan produksi padi sebesar 5 persen per tahun.

Pemberian subsidi pupuk yang selama ini ditempuh oleh pemerintah dalam konteks kebijakan fiskal telah menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah dituntut untuk mengurangi jumlah subsidi pupuk dan benih secara bertahap sehingga beban APBN dapat dikurangi demi terwujudnya *fiscal sustainability*. Namun, pada sisi lain pengurangan subsidi pupuk akan membawa implikasi naiknya harga pupuk di dalam negeri di samping skim subsidi harga yang selama ini diberikan selama ini dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan karena belum menunjukkan keberpihakan kepada petani sebagai produsen.

Upaya merespon dan mengevaluasi persoalan mengenai kebijakan subsidi pupuk yang dapat mendorong ekonomi dan distribusi pendapatan sebagai permasalahan penting. Pada penelitian ini juga dibangun sebuah kerangka pemikiran yang dituangkan dalam Model Ekonomi Keseimbangan Umum. Dimana model tersebut mengkaji dan memformulasikan interaksi kebijakan subsidi pupuk untuk jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap kinerja ekonomi

SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN II

Tabel 2. Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Fiskal untuk Subsidi Pupuk terhadap Distribusi Pendapatan Riil Rumah Tangga Di Perdesaan dan Perkotaan (%)

No.	Kelompok Rumahtangga	Jangka Pendek	Jangka Panjang
1.	Buruh pertanian di desa miskin	0.119	1.056
2.	Buruh pertanian di desa non mmiskin	0.108	0.974
3.	Pengusaha pertanian di desa miskin	0.112	1.122
4.	Pengusaha pertanian di desa non miskin	0.097	1.034
5.	Bukan pertanian golongan bawah desa miskin	0.097	1.171
6.	Bukan pertanian golongan bawah desa non miskin	0.083	1.106
7.	Bukan angkatan kerja di desa miskin	0.108	1.182
8.	Bukan angkatan kerja di desa non miskin	0.103	1.141
9.	Bukan pertanian golongan atas di desa miskin	0.121	1.270
10.	Bukan pertanian golongan atas di desa non miskin	0.121	1.251
11.	Bukan pertanian golongan bawah di kota miskin	0.123	0.998
12.	Bukan pertanian golongan bawah di kota non miskin	0.119	0.978
13.	Bukan angkatan kerja di kota miskin	0.125	1.035
14.	Bukan angkatan kerja di kota non miskin	0.126	1.037
15.	Bukan pertanian golongan atas di kota miskin	0.136	1.057
16.	Bukan pertanian golongan atas di kota non miskin	0.136	1.056

Sumber: Data diolah

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa baik pada jangka pendek maupun jangka panjang kebijakan subsidi pupuk berdampak positif terhadap redistribusi pendapatan dan kesejahteraan rumahtangga miskin, baik rumahtangga yang bekerja di pertanian dan bukan pertanian yang tinggal di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Peningkatan tingkat pendapatan riil pada kelompok rumahtangga berpenghasilan lebih tinggi di perdesaan dan di perkotaan yang bergolongan miskin diikuti oleh peningkatan pendapatan riil pada kelompok rumahtangga yang berpenghasilan lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan rumahtangga yang meningkat.

KESIMPULAN

Kebijakan subsidi pupuk sebagai kebijakan subsidi input diikuti oleh peningkatan jumlah output pada sektor yang bersangkutan dan sektor lainnya yang terkait. Hal ini pada jangka pendek dan jangka panjang akan berdampak positif terhadap redistribusi pendapatan baik rumahtangga yang bekerja di pertanian dan bukan pertanian yang tinggal di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Peningkatan tingkat pendapatan riil pada kelompok rumahtangga berpenghasilan lebih tinggi di perdesaan dan di perkotaan yang bergolongan miskin diikuti oleh peningkatan pendapatan riil pada kelompok rumahtangga yang berpenghasilan lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan rumahtangga yang meningkat.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akibat perbaikan sarana produksi, upah rata-rata nominal menurun (-1.152 persen).

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan dan Perkotaan

Kebijakan subsidi pupuk berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan riil rumahtangga di semua kelompok rumahtangga, baik yang bekerja pada sektor pertanian maupun di bukan pertanian, miskin dan tidak miskin, pada jangka pendek dan jangka panjang (lihat Tabel 2). Pada Tabel 2 nampak bahwa kebijakan subsidi pupuk berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan riil untuk seluruh kelompok rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian maupun bukan pertanian, yakni rumahtangga buruh dan pengusaha pertanian baik yang miskin maupun tidak miskin. Pada jangka pendek dampak perubahan pendapatan riil rumahtangga lebih rendah dibandingkan dengan jangka panjangnya. Hal ini membuktikan bahwa dalam jangka panjang perubahan pendapatan riil pada setiap golongan rumahtangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dan bukan pertanian yang tinggal di perdesaan dan perkotaan semakin meningkat yang akibat upah riilnya meningkat meskipun upah nominal rata-rata menurun.

Pada jangka pendek dampak positif dari kebijakan subsidi pupuk pada kelompok rumahtangga miskin yang bekerja di sektor pertanian baik sebagai buruh maupun pengusaha mampu mendorong peningkatan pendapatan riil rumahtangga, masing-masing berturut-turut sebesar (0.119 persen) dan (1.056 persen). Untuk kelompok rumahtangga yang bekerja di sektor bukan pertanian yang tinggal di perdesaan berkategori miskin, yaitu kelompok rumahtangga golongan bawah, bukan angkatan kerja dan golongan rumahtangga golongan atas secara berurutan adalah (0.097 persen), (0.108 persen) dan (0.121 persen). Selanjutnya, kelompok rumahtangga yang bekerja di sektor bukan pertanian yang tinggal di perkotaan yang berkategori miskin adalah (0.121 persen) rumahtangga berpendapatan rendah, (0.123 persen) rumahtangga bukan angkatan kerja, dan (0.136 persen) rumahtangga golongan atas.

Jangka panjang dalam CGE, merupakan akumulasi perilaku keseimbangan pasar dalam jangka pendek. Dampaknya tersebut, untuk kelompok rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian sebagai buruh maupun pengusaha yang termasuk katergori miskin adalah secara berturut-turut (1.056 persen) dan (1.122 persen). Untuk kelompok rumahtangga yang bekerja di sektor bukan pertanian yang tinggal di perdesaan berkategori miskin, yaitu kelompok rumahtangga golongan bawah, bukan angkatan kerja dan golongan rumahtangga golongan atas secara berturut-turut adalah (1.171 persen), (1.182 persen) dan (1.270 persen). Selanjutnya, kelompok rumahtangga yang bekerja di sektor bukan pertanian yang tinggal di perkotaan yang berkategori miskin adalah (0.998 persen) rumahtangga berpendapatan rendah, (1.035 persen) rumahtangga bukan angkatan kerja, dan (1.057 persen) pada rumahtangga golongan atas.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

persen), dan peningkatan impor (x0imp_c) sebesar (0.280 persen). Penomena ini sejalan dengan pendapat Domar (1947) mengenai peran ganda modal petani untuk meningkatkan produksinya dalam proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod-Domar investasi/modal dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui proses *investment multiplier* dan dalam jangka panjang merupakan proses akumulasi modal yang akan menambah stok modal dan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga investasi juga memengaruhi penawaran agregat.

Tabel 1. Hasil Simulai Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Beberapa Variabel Makroekonomi (%)

No.	Deskripsi	Variabel	Jangka Pendek	Jangka Panjang
1.	PDB riil sisi pengeluaran	x0gdpexp	0.031	0.274
2.	Neraca Perdagangan	delB	0.017	-0.097
3.	Indeks Deflator PDB	p0gdpexp	-0.214	-0.184
4.	Upah nominal rata-rata	p1lab_io	0.000	-1.152
5.	Indeks harga investasi	p2tot_i	0.062	0.125
6.	Indeks harga konsumen	p3tot	-0.376	-0.307
7.	Indeks harga ekspor	p4tot	-0.059	-0.038
8.	Indeks volume ekspor	x4tot	0.213	0.614
9.	Indeks volume impor	x0cif_c	0.313	0.280
10.	Output Agregat value added	x1prim_i	0.169	0.448
11.	Investasi riil agregat	x2tot_i	0.000	0.465
12.	Konsumsi rumahtangga riil	x3tot	0.000	0.332

Sumber: Data diolah

Kontribusi kebijakan subsidi pupuk ini terhadap kinerja ekonomi makro juga terlihat dari semakin efisiennya proses produksi domestik. Tingkat upah rata-rata nominal yang diterima tenaga kerja dalam jangka panjang menurun (-1.152 persen). Dalam jangka panjang, penurunan tingkat upah merefleksikan turunnya produk marjinal tenaga kerja, yang disebabkan penambahan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Turunnya tingkat upah domestik mengakibatkan harga produk domestik semakin murah. Hal ini mendorong harga ekspor produk domestik (p4tot) turun dibandingkan komoditas luar negeri, yaitu turun (-0.059 persen pada jangka pendek dan (-0.038 persen) pada jangka panjang. Tenaga kerja murah dan rendahnya harga komoditas domestik, akibat kebijakan subsidi input produksi, mampu meningkatkan dayasaing Indonesia dalam perdagangan internasional.

Semakin membaiknya dayasaing domestik ini menyebabkan indeks volume ekspor (x4tot) Indonesia meningkat (0.213 persen) pada jangka pendek dan (0.614 persen) pada jangka panjang. Peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi dan bertambahnya stok modal produksi dalam jangka panjang mengakibatkan ekspor meningkat lebih besar pada jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Peningkatan indeks volume ekspor mampu memperbaiki kondisi neraca perdagangan (delB), yaitu meningkat (0.017 persen) pada jangka pendek. Namun, membaiknya neraca perdagangan Indonesia tersebut diikuti oleh indeks volume impor (x0cif_c) meningkat (0.213 persen) pada jangka pendek meskipun kenaikannya masih dibawah kenaikan indeks volume ekspornya (x4tot). Kenaikan harga minyak bumi dan harga pangan dunia hingga pertengahan tahun 2008, berdampak menaikkan harga domestik. Konsekwensinya, peningkatan PDB riil dan penyerapan tenaga kerja tidak secara langsung mengakibatkan upah rata-rata nominal (p1lab_io) meningkat. Upah bersifat konstan dalam

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

khususnya indikator makroekonomi dan (2) distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan dan perkotaan.

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan untuk mengkonstruksi data dasar Model Ekonomi Keseimbangan Umum adalah data Tabel Input-Output Nasional tahun 2010 (BPS, 2015) dan SNSE Nasional tahun 2008 (BPS, 2010). Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai publikasi baik Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas maupun instansi/lembaga terkait lainnya dengan penelitian.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data menggunakan perangkat lunak program GEMPACK. Program tersebut untuk mengkonstruksi, memodifikasi, mengolah data dasar, pemodelan dan menghasilkan file solusi yang diadaptasi dari Model dasar WAYANG (Wittwarr, 1999). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Model Ekonomi Keseimbangan Umum (*Computable General Equilibrium, CGE*). Metode analisis data yang digunakan bersifat statik komparatif.

Simulasi Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Pemerintah melalui Menteri Pertanian berusaha untuk mempermudah kebutuhan petani dalam membeli pupuk dengan menyediakan pupuk bersubsidi. Untuk simulasi kebijakan dalam Penelitian ini menggunakan *closure* untuk simulasi kebijakan dengan memberikan *shock* pada peubah eksogen *f0tax1(c,i)* atau *general sales tax shifter to intermediate* sebesar rata-rata HET dari tahun 2012-2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Kinerja Makroekonomi

Dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap kinerja makroekonomi tercermin dari variabel-variabel yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dapat dihitung dari dua sisi, yaitu dari sisi pengeluaran dan sisi pendapatan. Dari sisi pengeluaran data makroekonomi yang digunakan meliputi konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor bersih (ekspor minus impor). Dari sisi pendapatan, data makroekonomi terdiri dari pendapatan dari lahan (*return to land*), tingkat pengembalian modal (*return to capital*) dan upah gaji. Hal ini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Kebijakan subsidi pupuk berdampak positif terhadap kinerja ekonomi makro. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan output agregat (x1prim_i) baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek peningkatan sebesar (0.169 persen) dan jangka panjang sebesar (0.448 persen). Peningkatan PDB riil dari sisi pengeluaran (x0gdpexp) sebesar (0.031 persen) pada jangka pendek dan (0.274 persen) pada jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan *endogenous growth theory* yang menekankan bahwa produktivitas meningkat, dalam penelitian ini akibat adanya kebijakan subsidi pupuk, maka produktivitas tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Romer, 2001; Lucas, 1988).

Peningkatan PDB riil dari sisi pengeluaran tersebut untuk jangka panjang bersumber dari peningkatan konsumsi rumahtangga riil (x3tot) sebesar (0.332 persen), peningkatan investasi riil (x2tot_i) sebesar (0.465 persen), peningkatan ekspor (x4tot) sebesar (0.614

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah bahwa kebijakan subsidi pupuk cukup efektif dalam meningkatkan distribusi pendapatan dan penurunan kemiskinan khususnya pada rumah tangga di perdesaan. Supaya efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut lebih baik, maka perlu memperbaiki struktur pasar baik di perdesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, implikasi kebijakannya adalah pemerintah perlu melanjutkan kebijakan subsidi pupuk dengan memperbaiki perencanaan, pemantauan, sistem distribusi dan pemberdayaan penyuluh lapangan. Di samping itu, bisa juga pemerintah menggantikan kebijakan tersebut dengan kebijakan lain yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2010. Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2015. Tabel Input-Output Indonesia 2010. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Chambers, R.G. and J. Quiggin. 2005. Output Price Subsidie in a Stochastic World. American Journal of Agricultural Economics, 87(7): 501-508.

Herman, A.S., Djumarman, dan H. Sukesi. 2005. Kajian Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi. Laporan Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Jakarta.

Kariyasa, K dan Y. Yusdja. 2005. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea Di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Sadoulet, E. and A. de Janvry. 1995. Quantitative Development Policy Analysis. The Jhon Hopkins University Press, London.

Sjari, D.R. 2007. Pengaruh Subsidi Harga Pupuk terhadap Pendapatan Petani: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Bank Indonesia, Jakarta.

Susila, W.R. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. Jurnal Litbang Pertanian, 29(2): 43-49.

Taufikurohman, M.R. 2004. Dampak Peningkatan Produktivitas Pangan terhadap Kinerja Sektoral dan Ekonomi Makro Indonesia: Analisis Ekonomi Keseimbangan Umum. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wittwarr, G. 1999. WAYANG: A General Equilibrium Model Adapted for the Indonesian Economy. Centre for International Economic Studies. School of Economics, The University of Adelaide.

World Bank. 2009. Fertilizer Subsidies in Indonesia. Policy Note. Indonesia Agriculture Public Expenditure Review, the World Bank, Jakarta.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 3. Surat Tugas

UNIVERSITAS TRILOGI
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT TUGAS
No. 31/FBIO/TGS/XI/2017

Dekan Fakultas Bioindustri, menugaskan :

DR. M. Rizal Taufikurohman
(dosen Program Studi Agribisnis)

Untuk menjadi pemakalah pada Seminar dan Diskusi Nasional Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, pada :

Hari/tanggal : Sabtu, tanggal 25 November 2017,
Tempat : Fakultas Pertanian – Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Malang 65145
Jawa Timur

Kami berharap Bapak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Trilogi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 November 2017

Yudhatfinda, Ph.D.
Dekan Fakultas Bioindustri

Tembusan :
- Wakil Rektor Bidang Akademik
- Kabag SDM
- Yang bersangkutan

Jl. Kampus TRILOGI/STEKPI No. 1 Kalibata - Jakarta 12760
Telp. 021 798 0011 (Hunting), Fax. 021 798 1352
Website : www.universitas-trilogi.ac.id
Email : info@universitas-trilogi.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 4. Bahan Paparan

SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN II

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

M. RIZAL TAUFIKURAHMAN
Universitas Trilogi

Malang, 25 November 2017

Outline

- Pendahuluan
- Kerangka Pemikiran
- Metode Penelitian
- Konstruksi Data Dasar Model
- Hasil dan Pembahasan
- Kesimpulan dan Rekomendasi

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

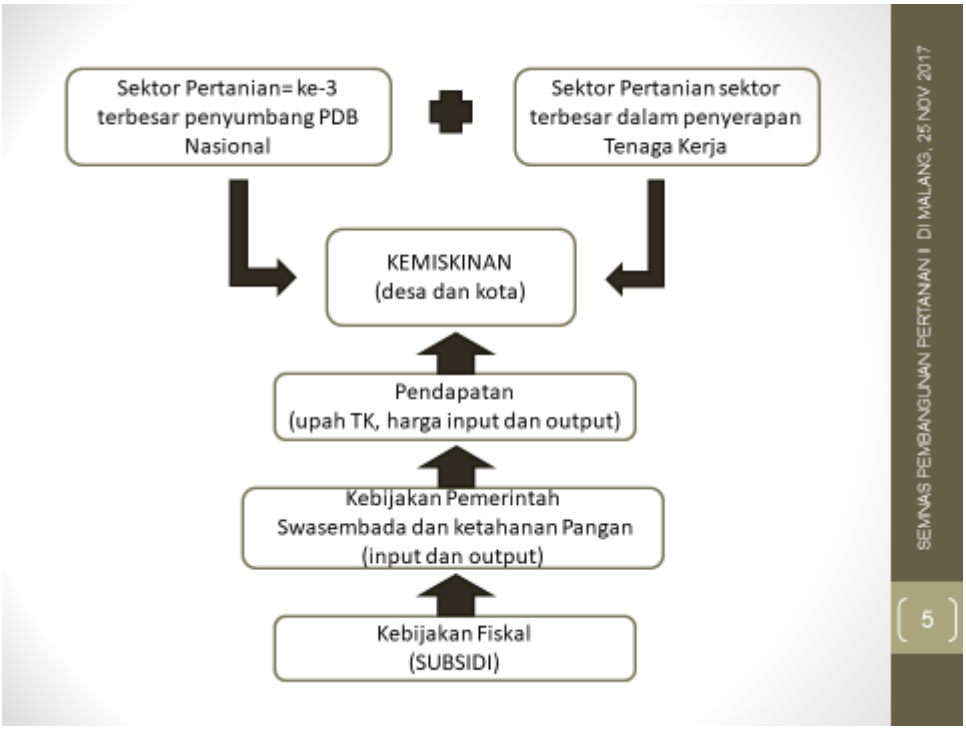

Perkembangan Subsidi Pemerintah Tahun 2005-2012 (dalam Rp Triliun)

JENIS SUBSIDI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 APBN-P	2012 APBN
Belanja Subsidi	**120,8**	**107,4**	**150,2**	**275,3**	**138,1**	**192,7**	**237,2**	**208,9**
Energi	**104,5**	**94,6**	**116,9**	**223,0**	**94,5**	**140,0**	**195,3**	**168,6**
- BBM	95,6	64,2	83,8	139,1	45,0	82,4	129,7	123,6
- Listrik	8,9	30,4	33,1	83,9	49,5	57,6	65,6	45,0
Non Energi	**16,2**	**12,9**	**33,3**	**52,2**	**43,5**	**52,8**	**41,9**	**40,3**
- Pangan	6,4	5,3	6,6	12,1	13,0	15,2	15,3	15,6
- Pupuk	2,5	3,2	6,3	15,2	18,3	18,4	18,8	16,9
- Benih	0,1	0,1	0,5	1,0	1,6	2,2	0,1	0,3
- PSO	0,9	1,8	1,0	1,7	1,3	1,4	1,8	2,0
- Kredit Program	0,1	0,3	0,3	0,9	1,1	0,8	1,9	1,2
- Subsidi Pajak	6,2	1,9	17,1	21,0	8,2	14,8	4,0	4,2
- Subsidi Lainnya	0,0	0,3	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

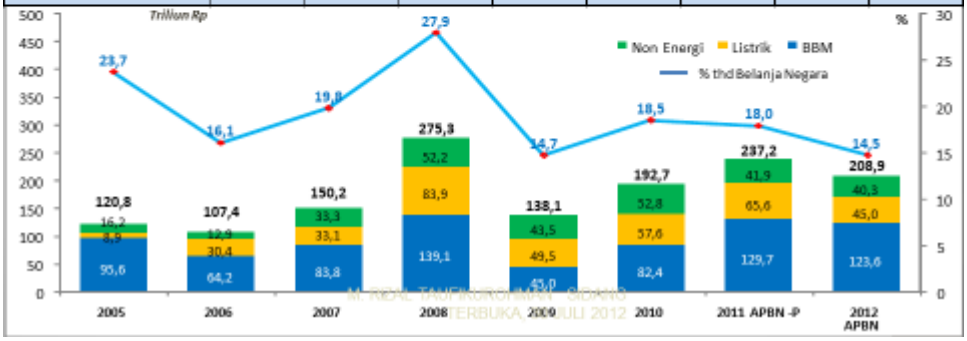

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

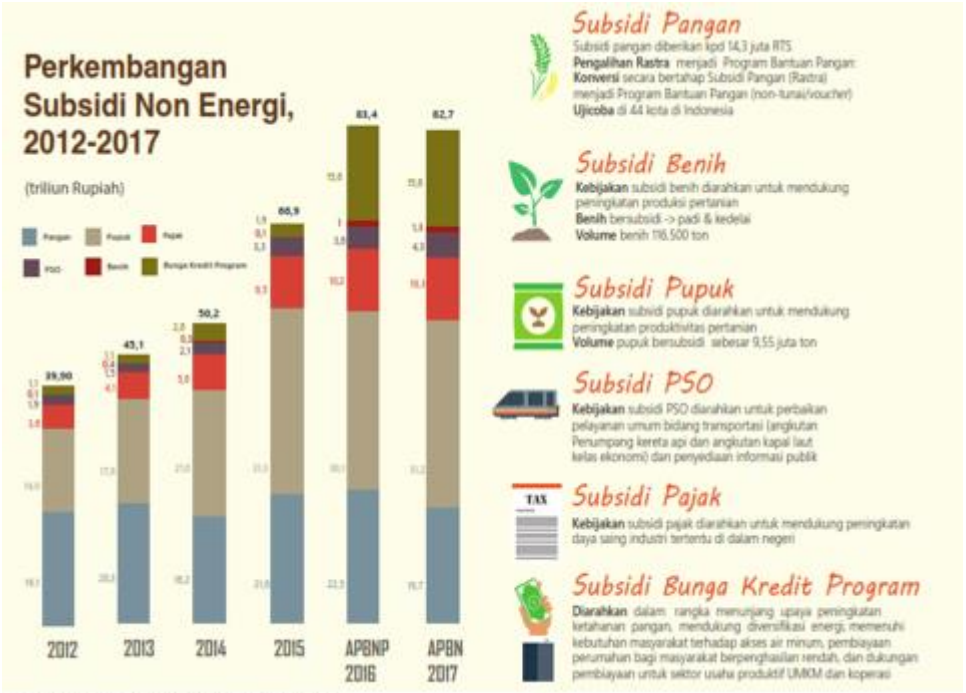

Sumber: Kementerian Keuangan, 2017

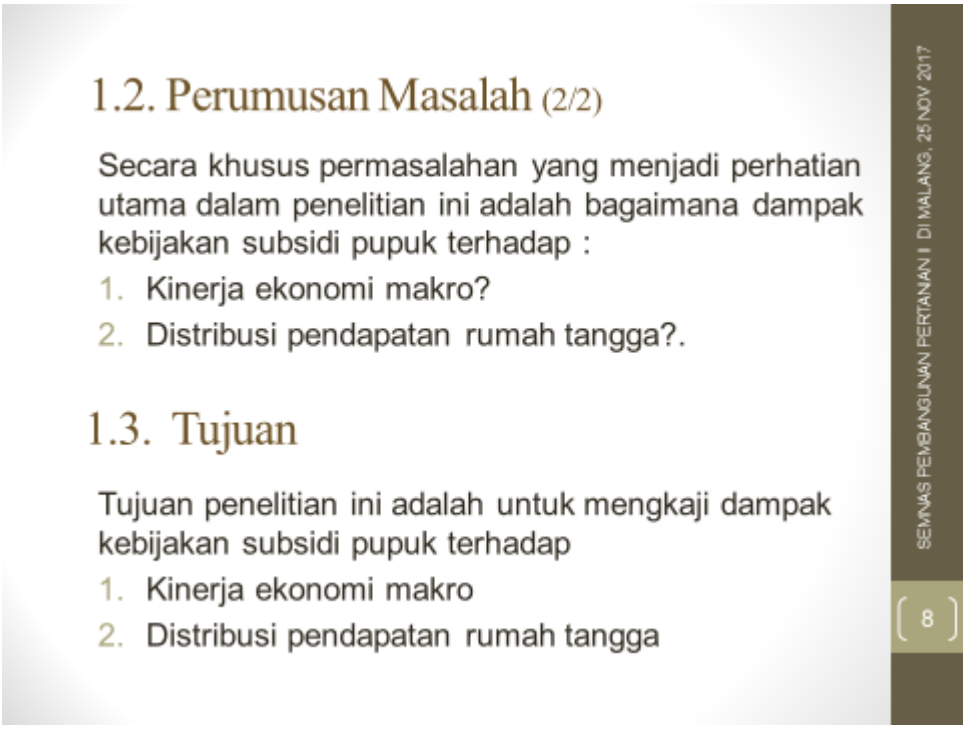

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

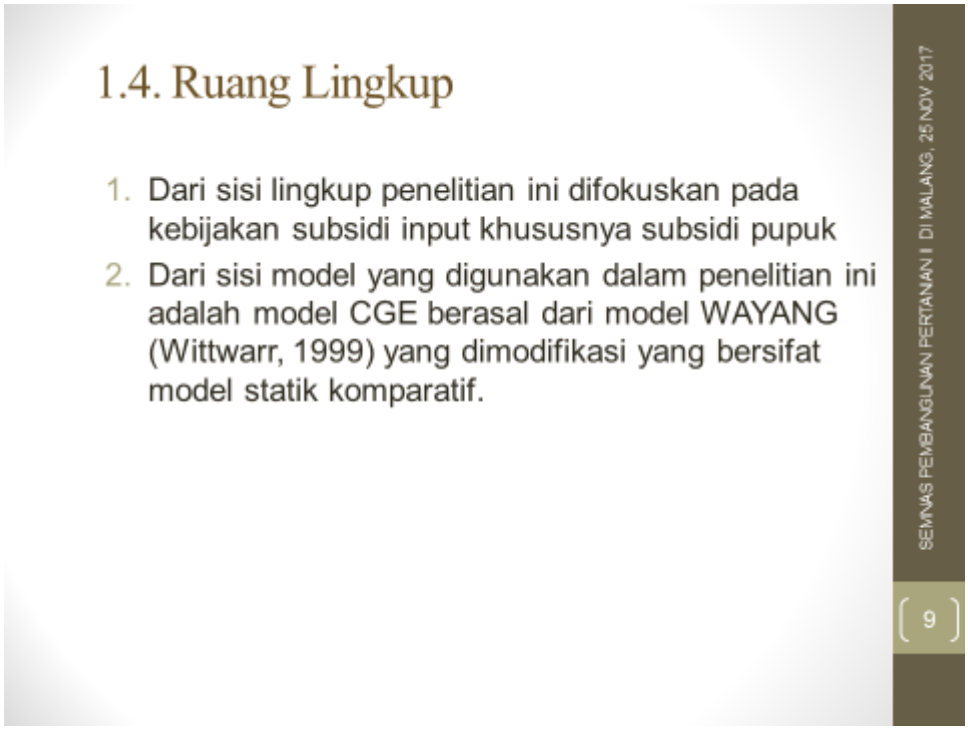

KERANGKA PEMIKIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

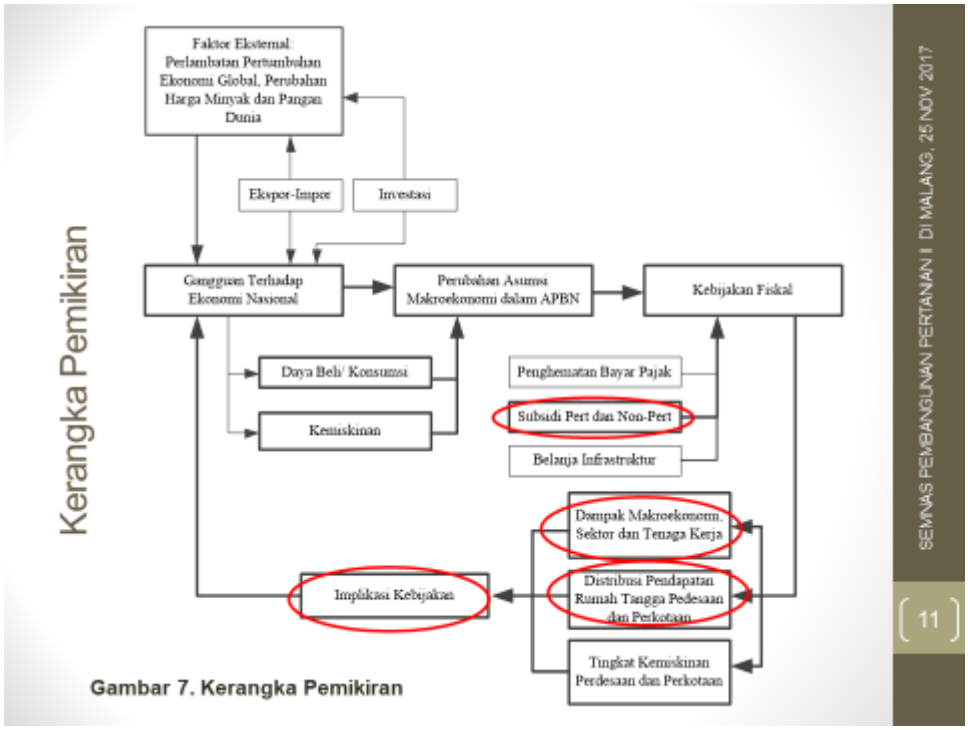

Gambar 7. Kerangka Pemikiran

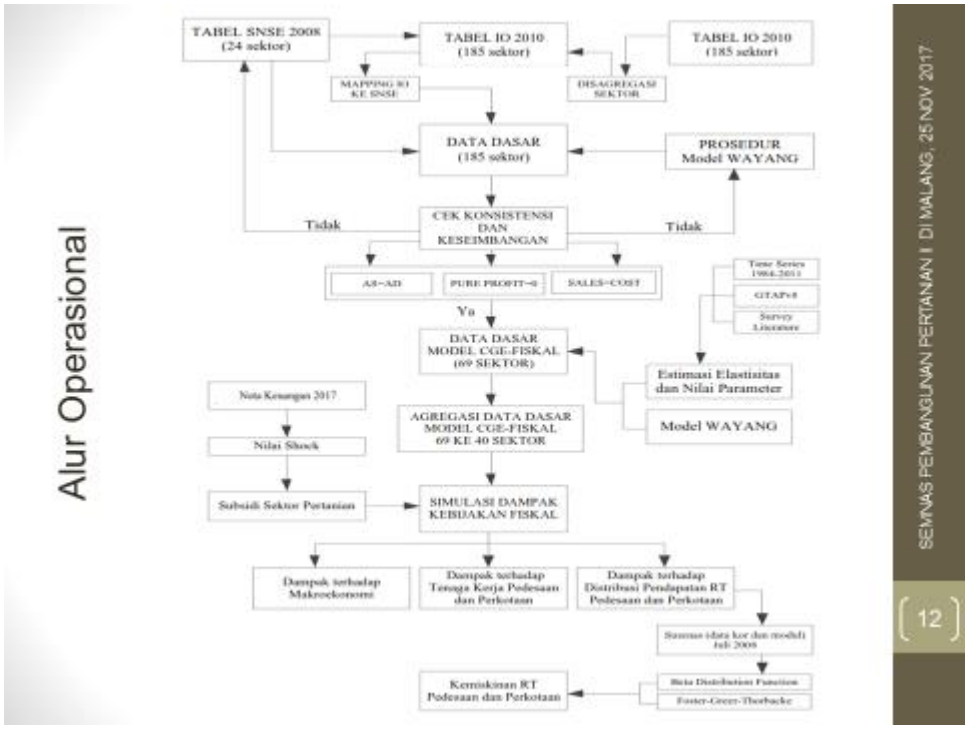

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

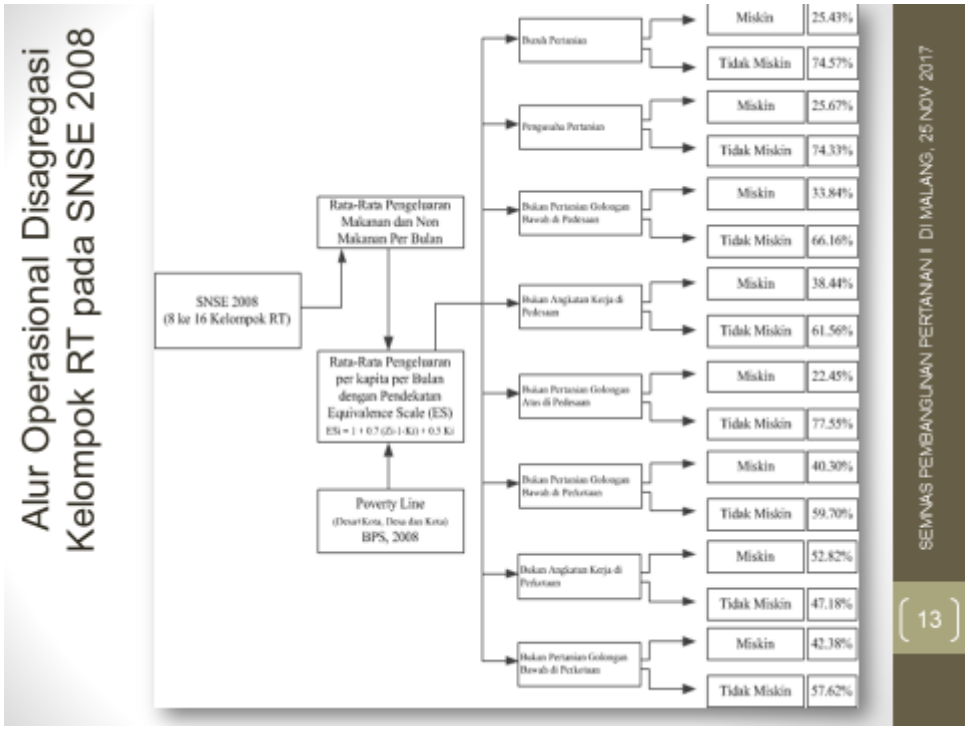

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis dan Sumber Data

- Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.
  Data utama yang digunakan adalah data Tabel I-O Nasional tahun 2010 (BPS, 2015) dan SNSE/SAM Nasional 2008 (BPS, 2010)
- Sumber data lain berasal dari berbagai publikasi baik Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Bappenas maupun instansi/lembaga terkait lainnya dengan penelitian.
- Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kebutuhan pengolahan dan analisis data.

4.2. Metode Pengolahan Data

- Metode pengolahan data menggunakan perangkat lunak program GEMPACK release11.2, Eviews v7, Stata v11.2 dan MS Excel.
- Program-program tersebut untuk mengkonstruksi, memodifikasi, mengolah data dasar, pemodelan dan menghasilkan file solusi yang diadaptasi dari Model WAYANG dan mengestimasi elastisitas.

4.3. Metode Analisis Data

- MetodeAnalisis yang digunakanadalah analisis Model Ekonomi Keseimbangan Umum dengan Model Bersifat Statik-Komparatif WAYANG (Wittwar, 1999), dimodifikasi.

  Model tersebutmerupakan model yang diadaptasi dari model ORANI-G. Struktur model tersebutdibangunsebagai Model Ekonomi Keseimbangan Umum yang sudah disesuaikandengan perekonomian Indonesia.

Alur Perumusan Masalah dengan Metodologi Penelitian

Perumusan Masalah	Tujuan	Metode Analisis	Sumber dan Jenis Data	Alat Mengolah Data
Bagaimana dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap : 1. Ekonomi kinerja ekonomi makro? 2. Distribusi pendapatan rumah tangga?	Mengkaji dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap : 1. Ekonomi kinerja ekonomi makro 2. Distribusi pendapatan rumah tangga	Model Ekonomi Keseimbangan Umum; WAYANG (Wittwar, 1999) dimodifikasi sesuai tujuan penelitian bersifat static komparatif	Tabel Input-Output 2010 (BPS, 2015), Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008 (BPS, 2009), Data timeseries terkait tenaga kerja (BPS, 1984-2016), GTAP database v8,	GEMPACK v10, GTAPAgg *databse* v8, EVIEWS v.7, MS Office 2010

4.4. Simulasi Kebijakan yang Dilakukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Pemerintah melalui Menteri Pertanian berusaha untuk mempermudah kebutuhan petani dalam membeli pupuk dengan menyediakan pupuk bersubsidi. Untuk simulasi kebijakan dilakukan dengan memberikan *shock* pada peubah eksogen *f0tax1(c,i)* atau *general sales tax shifter to intermediate* sebesar rata-rata HET dari tahun 2012-2016, yaitu sebesar 28.13%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Total Produksi (%)

No	Sektor	HASIL SIMULASI		No	Sektor	HASIL SIMULASI	
		SR	LR			SR	LR
1	Padi	0.176	0.317	21	KimiaKaret	0.012	0.342
2	Kedelai	0.227	0.355	22	Semen	-0.004	0.482
3	Jagung	0.209	0.339	23	LgmBsBj	-0.044	0.260
4	UmbiKacang	0.131	0.242	24	LgmBsNonBj	-0.030	0.431
5	SayurBuah	0.108	0.269	25	BrgLgm	-0.025	0.353
6	TanMakLain	0.600	0.674	26	MsnAngktn	-0.027	0.206
7	Perkebunan	0.973	1.307	27	IndLain	0.027	0.206
8	Peternakan	0.011	0.252	28	Gas	0.003	0.500
9	Kehutanan	-0.002	0.338	29	Listrik Air	-0.003	0.249
10	Perikanan	-0.004	0.140	30	Bangunan	0.008	0.291
11	OilGas	0.000	0.071	31	Perdagangan	-0.028	0.195
12	BtbaraLgm	-0.111	0.105	32	RestHotel	-0.006	0.258
13	KilangMnyk	-0.072	0.113	33	KeretaApi	-0.065	0.352
14	MakMinTem	0.019	0.219	34	AngkDarat	-0.034	0.234
15	Beras	0.180	0.316	35	AngkAir	-0.020	0.347
16	TPT	-0.159	0.389	36	AngkUdara	-0.019	0.171
17	BambuKayuRtn	-0.004	0.307	37	JsAngktn	0.018	0.285
18	PulpKrts	-0.007	0.263	38	Komunikasi	-0.001	0.157
19	Pupuk	9.676	10.565	39	Keuangan	-0.006	0.263

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Harga Output (%)

No	Sektor	HASIL SIMULASI		No	Sektor	HASIL SIMULASI	
		SR	LR			SR	LR
1	Padi	-1.328	-1.350	21	KimiaKaret	0.008	-0.091
2	Kedelai	-0.290	-0.272	22	Semen	0.085	0.110
3	Jagung	-1.363	-1.208	23	LgmBsBj	0.052	0.045
4	UmbiKacang	-0.384	-0.270	24	LgmBsNonBj	0.066	-0.041
5	SayurBuah	-0.466	-0.491	25	BrgLgm	0.046	-0.047
6	TanMakLain	-0.516	-0.440	26	MsnAngktn	0.064	-0.078
7	Perkebunan	-0.479	-0.515	27	IndLain	-0.120	-0.298
8	Peternakan	-0.023	-0.325	28	Gas	0.252	0.328
9	Kehutanan	0.026	0.424	29	Listrik Air	0.050	0.002
10	Perikanan	-0.028	-0.182	30	Bangunan	0.033	-0.177
11	OilGas	0.065	0.078	31	Perdagangan	-0.050	-0.339
12	BtbaraLgm	0.018	0.020	32	RestHotel	0.104	-0.229
13	KilangMnyk	0.113	0.253	33	KeretaApi	0.046	-0.285
14	MakMinTem	-0.120	-0.298	34	AngkDarat	0.035	-0.055
15	Beras	-0.828	-0.860	35	AngkAir	0.059	-0.159
16	TPT	0.016	-0.032	36	AngkUdara	0.039	-0.227
17	BambuKayuRtn	0.043	0.066	37	JsAngktn	0.115	0.136
18	PulpKrts	0.035	-0.103	38	Komunikasi	0.112	-0.071
19	Pupuk	-11.268	-10.435	39	Keuangan	0.010	-0.836

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Penyerapan TK di Pedesaan (%)

No	Sektor	HASIL SIMULASI		No	Sektor	HASIL SIMULASI	
		SR	LR			SR	LR
1	Padi	-0.574	0.275	21	KimiaKaret	0.086	1.016
2	Kedelai	0.076	0.939	22	Semen	0.069	1.315
3	Jagung	-0.550	0.390	23	LgmBsBj	0.014	1.046
4	UmbiKacang	-0.072	0.826	24	LgmBsNonBj	0.023	1.116
5	SayurBuah	-0.140	0.732	25	BrgLgm	-0.005	0.984
6	TanMakLain	0.323	1.163	26	MsnAngktn	0.029	0.990
7	Perkebunan	0.672	1.723	27	IndLain	0.091	0.834
8	Peternakan	0.047	0.802	28	Gas	0.033	0.975
9	Kehutanan	0.021	1.359	29	Listrik Air	0.033	0.975
10	Perikanan	-0.017	0.767	30	Bangunan	0.036	1.252
11	OilGas	0.035	0.823	31	Perdagangan	0.005	0.864
12	BtbaraLgm	-0.105	0.837	32	RestHotel	0.047	0.850
13	KilangMnyk	-0.026	0.930	33	KeretaApi	0.018	0.569
14	MakMinTem	0.091	0.834	34	AngkDarat	0.016	0.702
15	Beras	0.418	1.258	35	AngkAir	-0.051	1.018
16	TPT	-0.153	1.116	36	AngkUdara	0.027	0.767
17	BambuKayuRtn	0.031	1.070	37	JsAngktn	-0.006	0.904
18	PulpKrts	0.017	0.897	38	Komunikasi	0.044	0.995
19	Pupuk	14.890	17.663	39	Keuangan	0.083	0.996

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Penyerapan TK di Perkotaan (%)

No	Sektor	HASIL SIMULASI		No	Sektor	HASIL SIMULASI	
		SR	LR			SR	LR
1	Padi	-0.574	0.292	21	KimiaKaret	0.086	1.068
2	Kedelai	0.076	0.956	22	Semen	0.069	1.367
3	Jagung	-0.550	0.406	23	LgmBsBj	0.014	1.098
4	UmbiKacang	-0.072	0.843	24	LgmBsNonBj	0.023	1.167
5	SayurBuah	-0.140	0.749	25	BrgLgm	-0.005	1.035
6	TanMakLain	0.323	1.179	26	MsnAngktn	0.029	1.041
7	Perkebunan	0.672	1.740	27	IndLain	0.091	0.886
8	Peternakan	0.047	0.818	28	Gas	0.033	0.999
9	Kehutanan	0.021	1.376	29	Listrik Air	0.033	0.999
10	Perikanan	-0.017	0.784	30	Bangunan	0.036	1.276
11	OilGas	0.035	0.875	31	Perdagangan	0.005	0.888
12	BtbaraLgm	-0.105	0.889	32	RestHotel	0.047	0.874
13	KilangMnyk	-0.026	0.982	33	KeretaApi	0.018	0.593
14	MakMinTem	0.091	0.886	34	AngkDarat	0.016	0.726
15	Beras	0.418	1.310	35	AngkAir	-0.051	1.042
16	TPT	-0.153	1.168	36	AngkUdara	0.027	0.791
17	BambuKayuRtn	0.031	1.122	37	JsAngktn	-0.006	0.928
18	PulpKrts	0.017	0.949	38	Komunikasi	0.044	1.019
19	Pupuk	14.890	17.724	39	Keuangan	0.083	1.021
20	Pestisida	0.372	1.394	40	JsPemerintah	0.006	0.234

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Indikator Makroekonomi (%)

Deskripsi	Variabel	Jangka Pendek	Jangka Panjang
PDB riil sisi pengeluaran	x0gdpexp	0.031	0.274
Neraca Perdagangan	delB	0.017	-0.097
Indeks Deflator PDB	p0gdpexp	-0.214	-0.184
Upah nominal rata-rata	p1lab_io	0.000	-1.152
Indeks harga investasi	p2tot_i	0.062	0.125
Indeks harga konsumen	p3tot	-0.376	-0.307
Indeks harga ekspor	p4tot	-0.059	-0.038
Indeks volume ekspor	x4tot	0.213	0.614
Indeks volume impor	x0cif_c	0.313	0.280
Output Agregat	x1prim_i	0.169	0.448
Investasi riil agregat	x2tot_i	0.000	0.465
Konsumsi rumahtangga riil	x3tot	0.000	0.332

Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Distribusi Pendapatan (%)

Kelompok Rumahtangga	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Buruh pertanian di desa miskin	0.119	1.056
Buruh pertanian di desa non mmiskin	0.108	0.974
Pengusaha pertanian di desa miskin	0.112	1.122
Pengusaha pertanian di desa non miskin	0.097	1.034
Bukan pertanian golongan bawah desa miskin	0.097	1.171
Bukan pertanian golongan bawah desa non miskin	0.083	1.106
Bukan angkatan kerja di desa miskin	0.108	1.182
Bukan angkatan kerja di desa non miskin	0.103	1.141
Bukan pertanian golongan atas di desa miskin	0.121	1.270
Bukan pertanian golongan atas di desa non miskin	0.121	1.251
Bukan pertanian golongan bawah di kota miskin	0.123	0.998
Bukan pertanian golongan bawah di kota non miskin	0.119	0.978
Bukan angkatan kerja di kota miskin	0.125	1.035
Bukan angkatan kerja di kota non miskin	0.126	1.037
Bukan pertanian golongan atas di kota miskin	0.136	1.057
Bukan pertanian golongan atas di kota non miskin	0.136	1.056

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- Dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap indikator makro ekonomi melalui transmisi melalui peningkatan jumlah output sektoral, dan secara agregat meningkatkan produksi di sektor pertanian dan sector lainnya, serta pendapatan nasional.
- Kebijakan subsidi pupuk dalam jangka pendek dan jangka panjang berdampak positif terhadap distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan ini dirasakan rumahtangga yang bekerja di pertanian dan bukan pertanian baik di perdesaan maupun di perkotaan.
- Peningkatan tingkat pendapatan riil pada kelompok rumahtangga berpenghasilan lebih tinggi di perdesaan dan di perkotaan yang bergolongan miskin diikuti oleh peningkatan pendapatan riil pada kelompok rumahtangga yang berpenghasilan lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan rumahtangga yang meningkat.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rekomendasi

- Kebijakan subsidi pupuk cukup efektif dalam meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga di perdesaan. Supaya efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut lebih baik, maka perlu memperbaiki struktur pasar baik di perdesaan maupun di perkotaan.
- Implikasi kebijakannya adalah pemerintah perlu melanjutkan kebijakan subsidi pupuk dengan memperbaiki tahapan perencanaan, pemantauan, sistem distribusi dan pemberdayaan penyuluh lapangan.
- Di samping itu, bisa juga pemerintah perlu juga menggantikan atau menambahkan kebijakan subsidi input tersebut dengan skema kebijakan lain yang lebih efektif terutama terkait mekanisme pelaksanaannya.
- Kebijakan pupuk yang dilakukan pemerintah itu tidak hanya terkait dengan mekanismenya tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kesiapan alokasi anggarannya, bagaimana format kebijakan fiskalnya dan bagaimana dampaknya terhadap kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional secara umum.

SEMNAS PEMBANGUNAN PERTANIAN I DI MALANG, 25 NOV 2017

29

TERIMA KASIH